

LAPORAN TAHUN 2022



**ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN KEMASYARAKATAN
DAN PROTOKOL**

KATA PENGANTAR

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) tahun 2021 tidak dapat dilaksanakan di lingkungan Sekretariat Kabinet. Hal tersebut mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih.

Pada tanggal 4 Agustus 2022, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol) Sekretariat Kabinet berkesempatan menyelenggarakan FKP Tahun 2022 dengan mengusung tema: **Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah: “Bukan Sekedar Obrolan Biasa”**, yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

FKP ini dilaksanakan menggunakan metode Rapat Koordinasi yakni dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), dimana peserta saling memberikan pertanyaan, saran, dan kritik terkait kebijakan maupun masalah yang ditemukan. FKP dibuka secara langsung oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dan penyampaian laporan Asdep Humas dan Protokol sebagai unit penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Kabinet, dilanjutkan dengan pemaparan materi dari para narasumber terkait tema FKP, kemudian sesi diskusi dan tanya jawab yang dipandu oleh Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda pada Asdep Humas dan Protokol.

Sesi diskusi dan tanya jawab dalam FKP ini membuat peserta dapat saling memahami permasalahan yang ada dan bekerja sama untuk mencari solusi yang tepat. Peserta FKP terdiri dari internal dan eksternal penyelenggara pelayanan publik, akademisi, dan praktisi siniar.

Laporan Pelaksanaan FKP ini disusun untuk memberikan gambaran atas pelaksanaan reformasi birokrasi terkait evaluasi pelayanan publik dan pengelolaan pengaduan masyarakat pada Asdep Humas dan Protokol.

Jakarta, Agustus 2022

Asisten Deputi Bidang Hubungan
Kemasyarakatan dan Protokol,



Said Muhidin

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	3
BAB II PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK.....	5
2.1 Analisis Masalah.....	5
2.2 Pelaksanaan.....	13
2.2.1 Pra Pelaksanaan.....	13
2.2.2 Pelaksanaan.....	14
2.2.3 Pasca Pelaksanaan.....	17
BAB III PENUTUP.....	18
LAMPIRAN:	
1. Berita Acara Janji Perbaiki Pelayanan Publik.....	19
2. Notulensi.....	20
3. Foto-foto Kegiatan.....	37
4. Daftar Hadir.....	40
5. Tim Kerja Forum Konsultasi Publik.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol) menyelenggarakan beberapa fungsi, antara lain pengelolaan hubungan kemasyarakatan dan strategi komunikasi, peliputan, pengolahan informasi, dan pemberian layanan informasi yang berkaitan dengan kegiatan kabinet dan Sekretariat Kabinet (Setkab), serta pengelolaan media dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan kegiatan Kabinet dan Setkab, serta pemantauan dan evaluasi media arus utama dan media sosial.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut, Asdep Humas dan Protokol merasa perlu untuk terus memperluas cakupan diseminasi melalui jenis konten maupun media penyebaran yang baru. Untuk itu, pada tahun 2022 ini Asdep Humas dan Protokol berinovasi dan menginisiasi pembuatan siniar atau *podcast* resmi bernama Podkabs (*Podcast* Kabinet dan Setkab) yang tayang perdana pada 4 Februari 2022. Berbeda dengan konten publikasi Setkab lainnya, Podkabs dikemas dalam bincang-bincang santai dan ringan mengenai berbagai topik seputar kebijakan pemerintah, isu hangat yang berkembang di masyarakat, serta sisi lain dari pemerintahan dengan menghadirkan berbagai narasumber. Dengan adanya Podkabs diharapkan komunikasi publik pemerintahan dapat lebih diterima oleh berbagai lapisan masyarakat khususnya generasi muda yang akan menjadi aktor kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tahun 2045.

Hingga Juli 2022, Podkabs yang tayang sekali dalam sebulan ini sudah memiliki lima episode. Kelima episode tersebut menghadirkan narasumber para anggota Kabinet Indonesia Maju, yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang

Puspayoga, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Hadi Tjahjanto.

Layaknya sebuah inovasi, pengembangan dan penyempurnaan adalah hal yang mutlak diperlukan agar pemanfaatan Podkabs dalam dioptimalkan sebagai sarana komunikasi publik pemerintah dan Setkab. Setiap episode selalu dievaluasi baik dari aspek teknis maupun strategis. Kritik dan saran dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal pun menjadi salah satu unsur penting dalam upaya pengembangan dan penyempurnaan Podkabs. Kritik dan saran tersebut dapat berasal dari masyarakat, kementerian/lembaga terkait, praktisi, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu aspek yang perlu ditingkatkan adalah kapasitas dan kapabilitas pemandu siniar atau *host* yang merupakan salah satu aktor kunci untuk suksesnya sebuah siniar. Tak hanya mengajukan pertanyaan yang sudah disiapkan, pemandu siniar diharapkan dapat secara kreatif mengembangkan diskusi dan menggali informasi lebih lanjut berdasarkan jawaban dari narasumber. Selain itu, pemandu siniar juga diharapkan untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam menghidupkan suasana serta secara cerdas menyikapi berbagai situasi yang dapat terjadi di tengah siniar.

Agar dapat mengoptimalkan Podkabs sebagai sarana komunikasi publik, tentunya tak hanya pemandu siniar yang harus meningkatkan kapasitas dan kapabilitasnya melainkan seluruh komponen yang terlibat dalam Podkabs mulai dari riset, produksi, hingga publikasi dan pemantauan. Sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang dapat ditingkatkan antara lain mengenai strategi komunikasi publik melalui siniar, menggali ide kreatif, penulisan naskah, pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi yang relevan, teknik pengambilan video dan audio, penyuntingan, manajemen produksi, hingga trik promosi dan publikasi.

Dengan memperhatikan kebutuhan dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan Podkabs dalam komunikasi publik Setkab dan pemerintah pada umumnya, Asdep Humas dan Protokol telah menyelenggarakan sebuah Forum

Konsultasi Publik (FKP) dengan metode rapat koordinasi yang dikemas dalam bentuk Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT), dengan mengundang *stakeholders* terkait yakni praktisi dan akademisi di bidang siniar dan strategi komunikasi publik. Selain itu, diskusi juga menghadirkan perwakilan dari kementerian yang pernah menjadi narasumber di Podkabs atau memiliki siniar resmi. Melalui penyelenggaraan forum ini juga diharapkan agar seluruh komponen yang terlibat di dalam pengelolaan komunikasi dan pelayanan publik terutama Podkabs mendapatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta masukan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran masing-masing dalam upaya mengoptimalkan Podkabs sebagai sarana komunikasi publik Setkab dan pemerintah.

Hasil pelaksanaan kegiatan FKP ini kemudian dituangkan dalam laporan yang tersaji berikut ini.

1.2. Dasar Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

- a. Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
- c. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

1.3. Maksud dan Tujuan.

Maksud terselenggaranya kegiatan FKP ini adalah meningkatnya kinerja reformasi birokrasi di bidang pelayanan publik dan pengaduan

masyarakat yang diselenggarakan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.

Sedangkan tujuan FKP, yaitu:

1. Merumuskan strategi komunikasi pemerintah guna mendapatkan saran dan masukan dari para pemangku kepentingan pada Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol.
2. Menjadikan obrolan di dalam Podkabs tak hanya ringan dan santai namun juga kaya informasi dan nilai mengenai program dan kerja pemerintah, isu hangat di tengah masyarakat, serta sisi lain dari kabinet pemerintahan.
3. Meningkatkan jangkauan Podkabs.
4. Meningkatkan tanggapan atau *feedback* positif masyarakat di setiap penayangan Podkabs.
5. Meningkatkan rekognisi dan citra Setkab serta kabinet pemerintahan di tengah masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK

2.1. Analisis Masalah.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2022 dengan tema: **Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah: “Bukan Sekedar Obrolan Biasa”**, menghasilkan beberapa rekomendasi penting untuk peningkatan layanan publik kehumasan pemerintah terkait tema FKP tahun 2022 yang terangkum menjadi 5 (lima) poin penting, sebagai berikut:

- 1) Podkabs dapat diarahkan menjadi sarana komunikasi publik Setkab yang strategis karena sangat berpotensi untuk diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, *brand awareness* Podkabs dan Setkab harus terus diperkuat.
- 2) Nilai dasar yang harus ditanamkan adalah bahwa siniar adalah tentang pendengar sehingga informasi yang disampaikan melalui siniar harus relevan dan bermanfaat bagi pendengar.
- 3) Saran dan masukan dari para narasumber dan peserta akan diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan Podkabs, terutama dari sisi peningkatan performa pemandu siniar, penataan konsep yang lebih mengedepankan sisi humanis, durasi, promosi, dan penyuntingan.
- 4) Perlu dilakukan survei yang lebih mendalam tentang performa Podkabs ke berbagai kalangan, tidak hanya institusi pemerintah, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
- 5) Perlu pelatihan lebih lanjut secara spesifik terhadap berbagai aspek siniar, seperti pelatihan menjadi pemandu siniar, pelatihan penyuntingan, pelatihan pembuatan skrip, dan lainnya.

Dari kelima poin rekomendasi tersebut, Asdep Humas dan Protokol kemudian merumuskannya menjadi masalah yang harus ditindaklanjuti dengan menggunakan metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) Asdep Humas dan Protokol, sebagai berikut:

1. Kekuatan (*Strengths*).

Kekuatan Asdep Humas dan Protokol berkaitan erat dengan potensi strategis Asdep Humas dan Protokol dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet.

Kekuatan yang pertama adalah, Peran dan Kedudukan Strategis Asdep Humas dan Protokol. Asdep Humas dan Protokol memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis khususnya dalam melaksanakan hubungan kemasyarakatan serta koordinasi dan keprotokolan rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Sekretaris Kabinet. Selama kurun waktu tahun 2019-2022, Asdep Humas dan Protokol telah melaksanakan pengelolaan data dan informasi guna dilakukan diseminasi informasi yang akurat dan berimbang terkait program dan kebijakan pemerintah baik melalui website Sekretariat Kabinet maupun melalui media sosial yang dikelola Sekretariat Kabinet.

Kekuatan yang kedua adalah, Komitmen Pimpinan yang Tinggi. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asdep Humas dan Protokol didukung oleh komitmen pimpinan yang kuat untuk dapat bertindak cepat, inovatif, kreatif, dan adaptif dalam memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, serta terus melakukan upaya-upaya peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi Sekretariat Kabinet yang berkelanjutan.

Komitmen pimpinan dan seluruh jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Asdep Humas dan Protokol tergambar dalam keterlibatan aktif dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi melalui pelaksanaan program dan kegiatan untuk penataan, penyempurnaan, maupun peningkatan 8 (delapan) area perubahan, yakni peraturan perundang-undangan (internal), organisasi, tata laksana, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan area yang mendasari semua perubahan tersebut yakni perubahan pola pikir dan paradigma (manajemen perubahan), serta pelaksanaan percepatan program reformasi birokrasi (*quick win*).

Dalam peningkatan pelayanan kepada pemangku kepentingan, Asdep Humas dan Protokol juga melakukan pengembangan dan pemutakhiran sistem dan inovasi secara berkelanjutan seperti pembangunan dan pengelolaan Podkabs yang menghadirkan narasumber Menteri. Hal tersebut tentunya untuk menghasilkan *outcome* yang dapat dirasakan manfaatnya oleh para pemangku kepentingan dalam tugas pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet.

2. Kelemahan (*Weaknesses*).

Di samping kekuatan-kekuatan yang menjadikan Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja yang Berwibawa, Andal, dan Terdepan dalam Memberikan Dukungan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Kehumasan dan Keprotokolan Sekretariat Kabinet yang Berkualitas, Asdep Humas dan Protokol juga perlu mewaspadaikan kelemahan-kelemahan yang sampai saat ini masih ada untuk segera melakukan pembenahan. **Kelemahan-kelemahan** tersebut yaitu:

a. Belum Optimalnya Pemanfaatan Sistem dan Teknologi Informasi.

Upaya penerapan *e-government* dalam pengelolaan tugas dan fungsi manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan Protokol telah turut membantu dalam membangun dan mengembangkan sistem dan teknologi informasi guna mendukung kelancaran dalam pelayanannya. Sistem informasi yang telah dibangun dan dikembangkan yakni pewajahan *website* setkab.go.id menjadi “milenial dan berwibawa” serta pengelolaan media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter yang semakin berkembang, di samping juga pengelolaan Podkabs.

Walaupun sudah cukup upaya dalam pembangunan dan pengembangan sistem dan teknologi informasi sebagai bentuk penerapan *e-government* tetapi masih dirasakan bahwa pemanfaatan sistem dan teknologi informasi tersebut dirasakan belum optimal. Dalam hal ini para pemangku kepentingan belum sepenuhnya memanfaatkan sistem informasi tersebut sebagai sebuah kebutuhan.

Selain itu, juga perlu mendorong seluruh pegawai di lingkungan Asdep Humas dan Protokol untuk memanfaatkan sistem dan

teknologi informasi yang sudah dibangun, dikembangkan, dan disediakan dengan menerapkan dan menggunakannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

- b. Belum Optimalnya Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol dalam manajemen kabinet Sekretariat Kabinet harus didukung SDM yang memadai baik dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM dapat dilihat dari kapasitas dan kompetensinya, yang dihasilkan dari pengembangan kapasitas (*capacity building*). Pengembangan kapasitas merupakan aspek penting dalam suatu organisasi.

Pengembangan kapasitas dalam rangka pengembangan kompetensi SDM yang proporsional dengan beban kerja harus dilakukan agar dapat menciptakan pelaksanaan pekerjaan yang cepat, inovatif, kreatif dan adaptif yang dapat mendorong efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dalam memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, agar menjadi organisasi yang maju dan dapat beradaptasi dengan dinamika perkembangan, Asdep Humas dan Protokol harus didukung pengembangan kapasitas dan kompetensi SDM yang kuat dan proporsional sehingga mampu untuk mengatasi permasalahan internal maupun eksternal organisasi dalam pencapaian kinerja Asdep Humas dan Protokol.

- c. Dukungan Sarana dan Prasarana Belum Sesuai dengan Kebutuhan.

Ketersediaan sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas dan fungsi mutlak dibutuhkan. Sarana dan prasarana memiliki arti sebagai seperangkat alat yang bisa digunakan untuk mendukung keberlangsungan suatu kegiatan. Seperangkat alat yang digunakan untuk kelancaran kegiatan ini dapat mempermudah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dari suatu penyelenggaraan kegiatan.

Keberhasilan penyelenggaraan kegiatan dapat juga ditentukan karena adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan juga prasarana tidak hanya meliputi barang atau benda

saja tetapi juga dapat meliputi tempat atau bahkan ruangan yang bisa mendukung kelancaran kegiatan seperti ruangan Podkabs yang memadai terlebih kegiatan Podkabs menghadirkan narasumber Menteri.

d. Belum Optimalnya Pengenalan Tugas dan Fungsi Organisasi.

Salah satu tugas Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet adalah menyelenggarakan forum pengambilan kebijakan dalam bentuk sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun demikian, peran dan eksistensi dalam menjalankan tugas tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan oleh para pemangku kepentingan sehingga tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet tersebut belum menunjukkan hasil yang efektif dan optimal. Hal tersebut disebabkan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi belum terkomunikasikan dan dipahami oleh Kementerian/Lembaga serta masyarakat dan para pemangku kepentingan lainnya secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan pemahaman strategis tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam forum pengambilan kebijakan maka diperlukan strategi komunikasi publik pemerintah untuk menyampaikan pentingnya pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden sehingga terbentuk citra dan reputasi yang baik dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Dalam konteks tersebut, peran digital *Public Relation* (PR) melalui Podkabs dapat menjadi salah satu upaya untuk memperkenalkan peran strategis dari Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet kepada masyarakat.

Digital PR dapat dilakukan melalui media digital dan media sosial sebagai saluran yang kuat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Selain itu, pengembangan sosialisasi tugas dan fungsi organisasi juga dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi, rapat koordinasi, kerja sama, maupun kegiatan pendukung lainnya. Dengan

terbangunnya *image* organisasi, diharapkan pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensi Asdep Humas dan Protokol sebagai unit kerja di lingkungan Sekretariat Kabinet c.q Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet yang berperan dalam tugas dan fungsi sebagaimana tersebut di atas, dapat menjadi lebih dikenal, optimal, dan berwibawa.

3. **Peluang** (*Opportunities*).

Dinamika lingkungan eksternal yang cepat berkembang masih memberikan **peluang-peluang** yang memungkinkan Asdep Humas dan Protokol untuk berkembang. Peluang tersebut antara lain *website* Sekretariat Kabinet sebagai Rujukan Media Informasi Nasional. Secara rutin *website* Sekretariat Kabinet (setkab.go.id) yang dikelola oleh Asdep Humas dan Protokol senantiasa mempublikasikan berita atau artikel yang memuat program dan kebijakan pemerintah, baik yang berasal dari hasil sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin oleh Presiden maupun yang berasal dari Kementerian/Lembaga.

Website Sekretariat Kabinet, sebagai media yang digunakan Sekretariat Kabinet menyediakan dan menyampaikan data dan informasi, diantaranya terkait kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, baik kegiatan penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, maupun kegiatan pertemuan lainnya yang dihadiri dan/atau dipimpin Presiden, dan menyampaikan data dan informasi kegiatan kabinet. Selama ini *website* Sekretariat Kabinet telah menjadi rujukan utama bagi kementerian/lembaga, masyarakat, dan media/jurnalis nasional untuk mendapatkan informasi terkait kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dan Presiden maupun dalam mengklarifikasi berita-berita yang beredar di masyarakat.

Peluang lainnya adalah Kerja Sama dengan Mitra Kerja. Dalam memberikan dukungan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, Asdep Humas dan Protokol berperan secara aktif dan memiliki peluang untuk dapat berkolaborasi ataupun kerja sama dengan mitra kerja baik dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun lembaga-lembaga lainnya. Peluang membuka jaringan kerja sama tersebut sangat dimungkinkan mengingat keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang bersifat internal di lingkungan Asdep Humas dan Protokol. Dengan demikian, melalui berbagai kerja sama dengan mitra diharapkan

pelaksanaan tugas dan fungsi yang mengalami kelambanan, rumit, dan berbelit-belit dapat dilakukan dengan lebih cepat, efektif, dan efisien.

4. Ancaman (*Threats*).

Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa disamping banyaknya peluang-peluang yang tercipta, Asdep Humas dan Protokol juga memiliki **ancaman** dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Ancaman-ancaman yang timbul yaitu:

a. Sasaran terhadap Isu Negatif dan Berita Hoaks.

Salah satu dampak dari era internet yaitu menghadirkan berbagai kemudahan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan data dan informasi. Namun, dampak lain dari internet juga membuka ruang lebar bagi kehadiran informasi atau berita-berita bohong (*hoaks*) tentang suatu peristiwa yang meresahkan publik. Penyebaran berita bohong tidak hanya dapat memicu kemarahan dan kebencian, tetapi juga dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Kritik dan *hoaks* menjadi perhatian utama pemerintah, khususnya Asdep Humas dan Protokol yang mengelola *website* dan media sosial Sekretariat Kabinet, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan tidak kecil. Untuk menjawab isu sensitif dan meng-*counter* *hoaks*, Asdep Humas dan Protokol melakukan berbagai upaya dengan segera mengklarifikasi berita bohong (*hoaks*) atau dengan kata lain informasi harus dilawan dengan informasi.

Asdep Humas dan Protokol bekerja sama dengan *stakeholders* terkait dan melalui kanal media sosial yang dimiliki secara aktif melawan dan meredam ancaman penyebaran *hoaks* dengan menjawab dan meluruskan isu negatif yang menyudutkan pemerintah yaitu dengan membumikan dan menyosialisasikan keberhasilan program dan kebijakan pemerintah secara masif, terutama dengan pengelolaan *sinar* melalui *Podkabs*.

b. Belum Optimalnya Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Keberhasilan pencapaian untuk mewujudkan visi dan misi tidak semata diperoleh dari peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan Protokol semata, melainkan diperoleh juga dari keseluruhan peran

dan kontribusi pemangku kepentingan. Keberhasilan, peran aktif dan kontribusi Asdep Humas dan Protokol dalam keseluruhan aktivitas tidak berdiri sendiri namun sebagai hasil kerja sama Asdep Humas dan Protokol dengan pemangku kepentingan. Kerja sama dengan para pemangku kepentingan dilakukan dengan mengedepankan kepentingan bersama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam konteks penyelenggaraan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet yang dilakukan Asdep Humas dan Protokol, keseluruhannya melibatkan pihak-pihak atau pemangku kepentingan terkait yang apabila masih kurang mendukung, kurang optimal dalam bekerja bersama sesuai ketentuan dan kebijakan yang diamanatkan dan masih bertindak ego sektoral, maka hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi tugas pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet Sekretariat Kabinet, terlebih lagi dalam memberikan pelayanan prima kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu, harus dilakukan penguatan kerja sama yang dapat menciptakan kepercayaan dan pemahaman yang sama di antara pemangku kepentingan dalam menghadapi kerja Presiden yang sangat dinamis serta adanya masalah kurang koordinasi dan kerja sama yang baik antarkementerian/lembaga, antar pemerintah pusat dan daerah, maupun masalah ego sektor dan tumpang tindih. Menyikapi hal tersebut, agar tidak menjadi ancaman maka Asdep Humas dan Protokol secara berkala dan terus-menerus melakukan kerja sama maupun rapat koordinasi dengan berbagai stakeholders terkait dari kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya. Harapannya adalah, agar dengan kerja sama yang intensif dapat memberikan dukungan pelayanan prima kepada Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan serta masyarakat.

2.2. Pelaksanaan.

2.2.1. Pra Pelaksanaan.

a. Pembentukan Tim Forum Konsultasi Publik.

Penyelenggaraan FKP yang diselenggarakan Asdep Humas dan Protokol diawali dengan membentuk Tim/Panitia FKP Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Asdep Humas dan Protokol Tahun 2022, yang susunan keanggotaannya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan Asdep Humas dan Protokol.

b. Tema Forum Konsultasi Publik.

FKP Tahun 2022 mengusung tema: **Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah: “Bukan Sekedar Obrolan Biasa”**.

c. Ruang Lingkup Forum Konsultasi Publik.

Ruang lingkup Forum Konsultasi Publik ini adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara Asdep Humas dan Protokol sebagai unit penyelenggara layanan publik dengan para pemangku kepentingan untuk membahas Optimalisasi Pemanfaatan Siniar Dalam Komunikasi Publik Pemerintah.

d. Bentuk Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik.

Bentuk penyelenggaraan FKP adalah tatap muka.

e. Pihak yang Terlibat.

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan FKP antara lain:

1. Akademisi yakni Dosen Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia, pakar komunikasi publik, serta pakar dan peneliti siniar.
2. Ahli/Praktisi yaitu Ronal Surapradja (Praktisi Pemandu siniar, pengajar, *presenter*, penyiar radio, aktor, dan pemilik studio produksi rekaman) dan Sogi Indra Dhuaja (Praktisi Komisariss Podkesmas Asia Network, *talent manager* Podkesmas, penyiar radio, aktor, dan *presenter*).
3. Penyelenggara layanan yaitu Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol.

4. Anggota Komunitas Digital Setkab (KDS) yang merupakan representasi dari unit kerja dalam mendukung kehumasan Setkab;
5. Perwakilan kementerian yang pernah menjadi narasumber Podkabs atau memiliki siniar resmi;
6. Perwakilan humas dari lembaga kepresidenan;
7. Perwakilan dari unit kerja di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Inspektorat, Biro Umum, serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setkab.

f. Jadwal Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (*Run Down Acara*).

No.	Waktu	Acara
1.	08.35 - 08.45	Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Sekretariat Kabinet
2.	08.45 - 08.50	Pembacaan doa
3.	08.50 - 09.00	Laporan Kegiatan oleh Asisten Deputi Bidang Humas dan Protokol
4.	09.00 - 09.10	Sambutan sekaligus Pembukaan Acara oleh Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet
5.	09.20 - 13.00	Permasalahan di Bidang Pelayanan Publik terkait Optimalisasi Komunikasi Publik Pemerintah melalui Sinar
6.	13.15 - 16.15	Dialog terkait Pelayanan Publik untuk Merumuskan Strategi Komunikasi Pemerintah melalui Sinar
7.	16.15 – 16.20	Penandatanganan Berita Acara Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2020 oleh Asdep Humas dan Protokol Setkab
9.	16.20 – 16.30	Foto Bersama (<i>Screen Shot</i>)
10.	16.30	Penutupan Acara oleh MC

2.2.2. Pelaksanaan.

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan.

FKP dilaksanakan pada tanggal 4 Agustus 2022 di Aston Sentul Lake Resort & Conference Center, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

b. Hasil Pembahasan Forum Konsultasi Publik.

Adapun beberapa poin penting yang dibahas dalam FKP adalah sebagai berikut:

1) Potensi siniar sebagai komunikasi publik.

- a) Siniar adalah *new media* yang tengah berkembang pesat dan potensial sebagai sarana komunikasi publik.
- b) Siniar makin diminati masyarakat Indonesia. Persentase pengguna internet di Indonesia yang mendengarkan siniar dalam seminggu mencapai ketiga tertinggi di dunia dan didominasi kelompok umur 20-24 dan 15-19 tahun.
- c) Audio lebih cepat diserap otak atau ingatan dibandingkan dengan apa yang dilihat.
- d) Siniar dapat diakses kapan dan di mana saja.
- e) Format siniar yang bersifat *storytelling* dan dikemas secara ringan dan santai serta menonjolkan sisi humanis memungkinkan informasi yang disampaikan lebih dapat diterima berbagai kalangan.
- f) Prinsip yang harus diterapkan dalam siniar adalah '*content is the king, but context is the key*' yang artinya konten harus disampaikan dengan konteks yang relevan dengan pendengar. Pembuatan siniar harus berdasarkan kebutuhan pendengar bukan penyelenggara sehingga manfaat yang dirasakan pendengar menjadi sangat penting.
- g) Hal yang perlu diperhatikan dalam berbagai tahapan siniar adalah pembuatan gambaran besar atau *content matrix*; tahapan praproduksi yang meliputi riset topik, penjadwalan (termasuk konsistensi jadwal tayang, riset, perancangan konten, wawancara dan produksi, penyuntingan, rewiu, dan persetujuan layak tayang), struktur konten, dan *scripting*; tahapan produksi yang terdiri dari persiapan materi, penyampaian materi, dan perekaman; serta tahapan pascaproduksi yang terdiri dari rewiu hasil perekaman dan penyuntingan, desain materi publikasi, promosi berkala, pelibatan publik, dan *monitoring* dan evaluasi.

2) Lanskap siniar dalam komunikasi publik pemerintah

- a) Humas pemerintah harus menumpangi atau *riding the waves* perkembangan pesat dan peningkatan peminat siniar yang terjadi saat ini.
- b) Siniar dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan keterlibatan publik. Kebutuhan masyarakat akan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik sehingga pada akhirnya dapat memperoleh dukungan positif dan memelihara kepercayaan dari masyarakat.
- c) Meski sudah terdapat sejumlah kementerian/lembaga yang memanfaatkan siniar namun siniar belum dipandang sebagai sarana strategis komunikasi publik pemerintah. Padahal, audio lebih cepat diserap oleh otak atau ingatan dibandingkan dengan video.

3) Pemandu siniar adalah salah satu faktor kunci

- a) *Host* adalah salah satu faktor kunci dalam sebuah siniar, untuk itu sangat diperlukan untuk membangun persona dan kredibilitas *host* terutama di episode-episode awal siniar.
- b) Sebelum perekaman siniar, *host* harus menggali lebih dalam mengenai figur narasumber termasuk kepribadian, pekerjaan, capaian besar, pernyataan-pernyataan, hingga pendapat masyarakat mengenai yang bersangkutan.
- c) *Host* harus melakukan peninjauan terhadap narasumber untuk mengetahui hal-hal yang menarik yang dapat disampaikan narasumber kepada masyarakat.
- d) *Host* harus mampu membuat narasumber merasa nyaman, antara lain dengan mengirimkan daftar pertanyaan sebelum wawancara hingga menjelaskan tentang program siniar yang diampu termasuk target audiens, alokasi waktu, dan promosi.

4) Masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan Podkabs untuk optimalisasi komunikasi publik Sekretariat Kabinet

- a) Podkabs hadir pada momentum yang tepat yaitu di saat semakin pesatnya perkembangan platform dan konten berbasis digital audio dan semakin banyaknya peminat siniar di Indonesia.
- b) Podkabs sudah berada di jalur yang benar atau 'jalur yang asik' dengan mengedepankan sisi humanis sosok di pemerintahan dipadukan dengan penyampaian substansi.
- c) Namun, masih terdapat sejumlah ruang untuk pengembangan dan penyempurnaan, di antaranya kemampuan dan teknik pemandu siniar atau *host* termasuk penyempurnaan *bridging-in*, grafis, konsistensi, variasi narasumber dari berbagai kalangan termasuk masyarakat, hingga perbaikan konsep dan kemasan yang saat ini masing cenderung kaku dan 'sangat pemerintah'.
- d) Podkabs sebaiknya tidak lebih satu jam, 20-45 menit adalah waktu yang ideal. Jika episode Podkabs cukup panjang dapat dipertimbangkan untuk memecah menjadi beberapa tayangan agar dapat mempertahankan audiens.
- e) Satu episode Podkabs sebaiknya tidak hanya berhenti saat penayangan episode yang bersangkutan tetapi juga dapat diangkat kembali melalui konten *highlight* setelah tayang sehingga dapat memancing kembali datangnya penonton atau pendengar.
- f) Podkabs dapat menjadi rumah siniar pemerintah yang menjadi jembatan komunikasi dan merajut informasi dari berbagai kementerian/lembaga pemerintah.
- g) Podkabs dapat digunakan untuk meningkatkan membangun dan meningkatkan *brand awareness* Sekretariat Kabinet.

2.2.3. Pasca Pelaksanaan.

Penyelenggaraan FKP diakhiri dengan membuat janji perbaikan layanan dalam bentuk Berita Acara sebagaimana terlampir dalam laporan FKP ini.

BAB III

PENUTUP

Dari hasil penyelenggaraan FKP Asdep Humas dan Protokol Tahun 2022, telah menghasilkan 5 (lima) poin rekomendasi penting sebagai janji perbaikan atas layanan kehumasan pemerintah yang dibuat antara unit layanan bersama-sama dengan pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa *podcast* dapat diarahkan menjadi sarana komunikasi publik pemerintah yang strategis karena sangat berpotensi untuk diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, *brand awareness* Podkabs dan Setkab harus terus diperkuat.
2. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa terdapat nilai dasar yang harus ditanamkan yakni bahwa siniar adalah tentang pendengar sehingga informasi yang disampaikan melalui siniar harus relevan dan bermanfaat bagi pendengar.
3. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat bahwa perlu dilakukan pengelolaan saran dan masukan dari para narasumber dan peserta FKP yang akan diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan Podkabs, terutama dari sisi peningkatan performa pemandu siniar, penataan konsep yang lebih mengedepankan sisi humanis, durasi, promosi, dan penyuntingan.
4. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat perlu dilakukan survei yang lebih mendalam tentang performa Podkabs ke berbagai kalangan, tidak hanya institusi pemerintah, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
5. Unit Layanan bersama-sama Pemangku Kepentingan berpendapat perlu pelatihan lebih lanjut secara spesifik terhadap berbagai aspek siniar, seperti pelatihan menjadi pemandu siniar, pelatihan penyuntingan, pelatihan pembuatan skrip, dan lainnya.

LAMPIRAN

1. Berita Acara Janji Perbaikan Pelayanan Publik.



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA FORUM KONSULTASI PUBLIK

Pada hari ini, tanggal 4 bulan Agustus tahun 2022, di Aston Sentul *Lake Resort & Conference Center*, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan dan Protokol Sekretariat Kabinet telah mengadakan Forum Konsultasi Publik (FKP) dengan Para Pihak Terkait guna membahas permasalahan di bidang pelayanan publik untuk merumuskan strategi komunikasi pemerintah terkait pengelolaan *podcast*, dengan hasil Unit Layanan bersama-sama dengan Pemangku Kepentingan, berjanji akan melakukan perbaikan pelayanan dalam hal:

1. *Podcast* dapat diarahkan menjadi sarana komunikasi publik pemerintah yang strategis karena sangat berpotensi untuk diterima oleh berbagai kalangan masyarakat. Untuk itu, *brand awareness* Podkabs dan Setkab harus terus diperkuat.
2. Menanamkan nilai dasar bahwa siniar adalah tentang pendengar sehingga informasi yang disampaikan melalui siniar harus relevan dan bermanfaat bagi pendengar.
3. Melakukan pengelolaan saran dan masukan dari para narasumber dan peserta FKP yang akan diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan Podkabs, terutama dari sisi peningkatan performa pemandu siniar, penataan konsep yang lebih mengedepankan sisi humanis, durasi, promosi, dan penyuntingan.
4. Melakukan survei yang lebih mendalam tentang performa Podkabs ke berbagai kalangan, tidak hanya institusi pemerintah, agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif.
5. Melakukan pelatihan lebih lanjut secara spesifik terhadap berbagai aspek siniar, seperti pelatihan menjadi pemandu siniar, pelatihan penyuntingan, pelatihan pembuatan skrip, dan lainnya.

Jakarta, 4 Agustus 2022

Asisten Deputi Bidang Hubungan Kemasyarakatan
dan Protokol,

Said Muhidin, S.H., M.H.

2. Notulensi.

I. PENDAHULUAN.

1. Kegiatan DKT diikuti oleh sekitar 77 (tujuh puluh tujuh) orang peserta yang terdiri dari:
 - a. pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol (Asdep Humas dan Protokol);
 - b. anggota Komunitas Digital Sekretariat Kabinet (KDS) yang merupakan representasi dari unit kerja di Sekretariat Kabinet (Setkab);
 - c. perwakilan kementerian yang pernah menjadi narasumber Podkabs (*Podcast* Kabinet dan Setkab) atau memiliki siniar resmi;
 - d. perwakilan humas dari lembaga kepresidenan; dan
 - e. perwakilan dari unit kerja di Kedeputan Bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK), Inspektorat, Biro Umum, serta Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Setkab.

2. Narasumber DKT adalah akademisi dan praktisi siniar atau *podcast*, yaitu Peny Meliaty Hutabarat, Dosen Jurusan Penyiaran Multimedia Universitas Indonesia yang juga praktisi dan peneliti siniar serta Ronal Surapradja dan Sogi Indra Dhuaja, dua orang figur publik yang telah lama bergelut di dunia penyiaran dan *podcast*.

3. Kegiatan DKT diawali dengan Laporan Asdep Humas dan Protokol Said Muhidin, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pemilihan tema DKT Optimalisasi Pemanfaatan Siniar dalam Komunikasi Publik Pemerintah "Bukan Sekadar Obrolan Biasa" sejalan dengan semakin terlihatnya peran dan manfaat siniar di dalam komunikasi publik pemerintah.

- b. Podkabs adalah upaya Setkab untuk memperluas cakupan publikasi, terutama generasi muda yang menjadi aktor kunci dalam mewujudkan cita-cita Indonesia, melalui obrolan yang dikemas secara ringan dan santai mengenai kebijakan pemerintah, isu terkini, hingga sisi lain kabinet pemerintahan.
 - c. Podkabs telah tayang 5 (lima) episode dengan narasumber Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia (BKPM), serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto.
 - d. Tayangan Podkabs memperoleh tanggapan yang beragam dari audiens, termasuk apresiasi dan masukan.
 - e. Kualitas Podkabs perlu terus ditingkatkan mulai dari praproduksi, produksi, hingga pascaproduksi atau publikasi. Sejumlah hal yang perlu ditingkatkan antara lain mengenai strategi komunikasi publik melalui siniar, menggali ide kreatif, penulisan naskah, teknik pengambilan video dan audio, penyuntingan, manajemen produksi, hingga trik promosi dan publikasi.
 - f. Penyelenggaraan DKT diharapkan memberikan ilmu pengetahuan, keterampilan, serta masukan dan pengalaman yang dibutuhkan dalam mengoptimalkan peran seluruh sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam siniar, dalam upaya mengoptimalkan siniar sebagai sarana komunikasi publik pemerintah.
4. Deputi DKK Thanon Aria Dewangga menyampaikan sambutan sekaligus secara resmi membuka DKT. Beberapa hal yang disampaikan adalah:
- a. DKT diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan keterampilan kepada peserta, terutama pengelola Podkabs yang terdiri dari Asdep Humas dan Protokol serta KDS.
 - b. KDS adalah komunitas yang dibentuk secara khusus untuk memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan kehumasan di Setkab, terutama

- penyelenggaraan Podkabs. Pembentukan KDS juga merupakan salah satu jawaban atas tantangan keterbatasan SDM kehumasan.
- c. Selain keterbatasan, tantangan lainnya adalah keterbatasan anggaran, untuk itu dalam mewujudkan inovasi Podkabs dan inovasi lainnya Setkab kerap bekerja sama dengan sejumlah pihak termasuk BUMN.
 - d. Podkabs yang merupakan wujud implementasi dari arahan Seskab untuk menjangkau lebih banyak audiens dan mengubah pola komunikasi lembaga pemerintah yang cenderung kaku ini adalah sarana komunikasi publik dan juga *branding* Setkab dan kabinet pemerintahan.
 - e. Setiap elemen Setkab harus mempunyai rasa kepemilikan atau *sense of belonging* terhadap Podkabs.
 - f. Pengelolaan Podkabs harus konsisten dan terus dioptimalkan sebagai sarana komunikasi publik Setkab dan kabinet pemerintahan.

II. PEMAPARAN NARASUMBER

SESI MELIATY HUTABARAT, S.SOS, MSM

1. Memaparkan mengenai Optimalisasi Komunikasi Publik Pemerintah melalui Siniar, dengan poin sebagai berikut:
 - a. Fokus materi yang disampaikan yaitu kekuatan siniar sebagai saluran komunikasi publik, pertumbuhan siniar di Indonesia, humas pemerintah dan lanskap pemanfaatan siniar di lembaga pemerintahan, serta strategi siniar untuk komunikasi publik.
 - b. Podkabs termasuk ke dalam media baru atau *new media* yang mulai berkembang pesat di tahun 2020. Saat ini format siniar terdiri dari dua jenis, yaitu *audio podcast*, contohnya di kanal Spotify dan *video podcast*, contohnya di kanal YouTube.
 - c. Siniar berkembang pesat di Indonesia dengan pendengar yang didominasi oleh kelompok umur 20-24 dan 15-19 tahun yang mencapai lebih dari 20 persen. Persentase pengguna internet di Indonesia yang mendengarkan siniar dalam seminggu mencapai ketiga tertinggi di dunia, setelah Meksiko dan Brasil.

- d. Sejumlah alasan perlunya untuk menggunakan *podcast* sebagai sarana komunikasi adalah:
- 1) Audio menjadi medium yang semakin *powerful* di era digital.
 - 2) Siniar terus mengalami pertumbuhan selama beberapa tahun terakhir.
 - 3) Audio lebih mudah diingat dibandingkan dengan sesuatu yang dilihat.
 - 4) Terdapat masyarakat yang lebih memilih untuk mendengarkan siniar dibandingkan menonton video.
 - 5) Dapat didengarkan kapan dan di mana saja.
- e. Empat konten yang mendorong *engagement* audiens, yaitu:
- 1) Konten yang mengedukasi (*content to educate*).
 - 2) Konten yang menghibur (*content to entertain*).
 - 3) Konten yang menginspirasi (*content to inspire*).
 - 4) Konten yang mencerahkan dan memancing keterlibatan (*content to convert*).
- f. Hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan siniar, antara lain:
- 1) *Content-matrix*
 - Saat membuat banyak konten untuk berbagai saluran komunikasi publik, sangat mudah untuk dapat terlewat/lupa dengan gambaran besar atau *big picture* yang telah dirancang.
 - *Content matrix* membantu untuk memiliki '*bird's eye view*' dari strategi konten untuk jangka panjang.
 - Tim komunikasi di instansi pemerintah dapat merancang kategori program/konten siniar berdasarkan *content matrix*.
 - 2) Tahapan Praproduksi
 - Dalam tahapan praproduksi, tim siniar perlu memulai perencanaan dengan menentukan aspek-aspek:
 - o Topik
 - Diperlukan riset topik agar tidak hanya menarik bagi publik yang mendengar/menonton tetapi juga relevan.
 - Pemilihan topik dan judul yang menarik diperlukan agar memberikan daya tarik tersendiri bagi publik, terlebih jika topiknya belum banyak dibahas.

- o Jadwal
 - Konsistensi frekuensi tayang siniar sangat diperlukan.
 - Selain jadwal tayang, jadwal lain yang perlu masuk dalam *checklist* untuk jadwal yaitu jadwal meriset tentang narasumber dan topik yang relevan, jadwal perancangan konten, *script writing*, perancangan *wow experience* (seperti *surprise* di dalam segmen siniar), jadwal wawancara narasumber dan produksi, serta jadwal penyuntingan, revidi, dan persetujuan layak tayang.
 - o Struktur Konten

Struktur konten akan membantu membuat skrip atau penyusunan naskah siniar.
 - o *Scripting*
 - Naskah dapat berupa narasi lengkap atau poin kunci yang dapat diimprovisasi saat perekaman.
 - Riset yang cukup dalam menyusun materi dan naskah.
 - Naskah dapat dibuat dalam format yang membuat pemandu siniar atau *host* nyaman saat membacanya.
- 3) Tahapan Produksi, yang terdiri dari persiapan materi, penyampaian materi, dan perekaman.
- 4) Tahapan Pascaproduksi, yang terdiri dari :
- Revidi hasil perekaman dan penyuntingan.
 - Design materi publikasi (*e-poster/short video/copywriting* pada *caption* media sosial).
 - Promosi berkala di media sosial serta dihubungkan dengan *website* dan multiplatform lainnya.
 - Pelibatan publik, seperti melalui kuis atau usulan topik berikutnya.
 - Pelajari statistik pendengar dan penonton serta evaluasi pada konten yang sudah dirilis.
- g. Penggunaan siniar dalam komunikasi publik pemerintah:
- 1) Humas pemerintah baik di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah telah mulai mengadopsi siniar sebagai medium baru dalam komunikasi publik sejak tahun 2020 dan 2021. Namun

belum banyak instansi pemerintah yang cepat mengadopsi siniar sebagai bagian dari strategi komunikasi publik.

- 2) Siniar dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kepercayaan publik sekaligus meningkatkan keterlibatan publik.
 - 3) Kebutuhan masyarakat akan informasi terkait kebijakan dan program pemerintah bisa tersampaikan dengan baik melalui siniar sehingga pada akhirnya dapat memperoleh dukungan positif dan memelihara kepercayaan dari masyarakat.
- h. Strategi siniar untuk komunikasi publik, antara lain:
- 1) *Content is the king, but context is the key*, konten disampaikan dengan konteks yang dapat terhubung dengan pendengar.
 - 2) Selalu sediakan lebih banyak materi daripada yang dibutuhkan, tetapi pastikan materi yang disajikan adalah yang mempunyai *super value* pada publik pendengar/penonton siniar.
 - 3) Pahami kebiasaan pendengar dan kebutuhan informasinya.
 - 4) Saat merancang konten, perlu memahami kebutuhan pendengar dan berpikir dari posisi pendengar.
- i. Sejumlah faktor kunci terkait strategi komunikasi publik melalui siniar:
- 1) Pemandu siniar sebagai *voice of influence & authority*
 - Persona dari seorang pemandu siniar khususnya untuk episode-episode awal terbentuknya siniar sangatlah penting.
 - Kredibilitas pemandu siniar juga sangat penting. Pendengar dan penonton siniar 'membentuk' hubungan dengan pemandu siniar karena mereka merasa sedang diajak bicara secara langsung.
 - 2) *Brand Narrative*
 - Melalui siniar *brand* diaktivasi untuk menceritakan *in-depth stories* yang tidak dapat tersampaikan melalui platform media sosial lain;
 - Siniar adalah alat yang punya kekuatan mengontrol *brand narrative*.
 - Siniar harus digunakan untuk mencapai *brand awareness* dan memperdalam hubungan dengan publik dan target khalayak.
 - Pendengar siniar memiliki kecenderungan potensial untuk menjadi mediator yang hebat dalam *word-of-mouth*.
 - 3) *Storytelling*

- Siniar sebagai kesempatan untuk bercerita tentang individu/sosok, kelembagaan, kebijakan, isu dan informasi yang relevan untuk memberikan pengetahuan, kepedulian, keahlian, dan pemahaman tentang area tertentu.
- Audiens siniar adalah kelompok yang canggih, mudah bosan, dan mempunyai banyak pilihan sehingga peran narator menjadi sangat penting.

4) Membangun kepercayaan dan kredibilitas

Siniar adalah mengenai membangun kepercayaan dan kredibilitas.

2. Dalam diskusi, sejumlah peserta menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:

a. **Ricky Yohannes**, perwakilan dari Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kementerian Keuangan (Biro KLI Kemenkeu), menyampaikan/menanyakan:

- 1) Siniar Kemenkeu sering dibelokkan oleh isu-isu lain yang tidak terkait program Kemenkeu.
- 2) Konten siniar Kemenkeu tidak begitu populer di masyarakat, seperti APBN, tidak sama dengan konten siniar Setkab.
- 3) Konten siniar Setkab selain menghadirkan menteri, juga perlu mengundang narasumber dari level teknis seperti eselon I dari kementerian/lembaga (K/L).
- 4) Hambatan Kemenkeu dalam pengelolaan konten adalah terkait level kewenangan.
- 5) Apakah konten siniar dapat dipisahkan isu-isunya?

Narasumber menjelaskan bahwa perlu pemisahan konten yang sifatnya sensitif dan perlu SDM yang dapat mengelola hal tersebut. Selain itu, perlu juga diperhatikan sisi humanis dalam pengelolaan siniar oleh Kemenkeu dan instansi lainnya.

b. **Novilia Mayasari**, anggota KDS, menanyakan terkait target audiens Podkabs, apakah perlu diperluas atau difokuskan serta bagaimana mitigasi risikonya. Terhadap pertanyaan ini, narasumber menjelaskan bahwa dilihat dari episode Podkabs perlu dibuat profil persona dengan

terlebih dahulu membangun *awareness*. Selain itu, perlu pula untuk membuat riset konten.

c. **Akhmad Firmannamal**, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara (Kemensekneg), menyampaikan/menanyakan:

1) Strategi komunikasi pemerintah terkait isu pemblokiran Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menggunakan kanal sinar Deddy Corbuzier bukan kanal sinar pemerintah.

2) Rencana pembuatan sinar Kemensekneg.

Menanggapi pertanyaan dan pernyataan Firman, narasumber menyampaikan bahwa sinar pemerintah, termasuk sinar yang akan dibangun Kemensekneg dapat menjadi rumah informasi resmi pemerintah untuk menyampaikan isu-isu publik pemerintah yang dapat juga mengedukasi masyarakat.

d. **Novia Ayu Rinaldy**, anggota KDS, menyampaikan/menanyakan:

1) Strategi komunikasi salah satunya adalah menentukan topik.

2) Penentuan topik dapat menjadi *benefit* namun dapat juga menjadi bumerang.

3) Bagaimana strategi dalam menentukan topik sehingga dapat menjadi hal yang positif bagi masyarakat?

Narasumber menjelaskan, perlu riset untuk menentukan topik apa yang dapat dibahas di sinar pemerintah.

e. **Dwi Suryo Kusuma Dwi**, perwakilan dari Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR, menyampaikan/menanyakan:

1) Kementerian PUPR telah mengelola Sinar Sigap Membangun Negeri dengan topik program PUPR terkait pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

2) Bagaimana strategi yang sebaiknya dibangun sehingga masyarakat tertarik untuk menonton sinar tersebut?

3) Kementerian PUPR juga mengunggah sinar Podkabs yang menghadirkan Menteri PUPR sebagai narasumber, namun audiensnya tidak sebanyak sinar Setkab.

Narasumber menekankan perlu adanya *sharing* antarsinar pemerintah terutama *sharing* konten Podkabs. Selain itu, perlu ada tim yang

mengolah *copywriting* media sosial agar dapat memunculkan narasi-narasi menarik bagi masyarakat. *Post production* juga perlu dikelola dengan baik.

- f. **Dewa Ayu Sekar Saraswati**, anggota KDS, menanyakan mengenai strategi konsistensi konten yang disampaikan melalui Podkabs sehingga menarik bagi masyarakat. Narasumber menekankan perlu konsistensi dalam menyampaikan aspek konten yang humanis untuk membangun *awareness* terlebih dahulu.

SESI RONAL SURAPRADJA & SOGI INDRA DHUAJA

1. **Ronal Surapradja** menyampaikan paparan Menjadi Pemandu Siniar yang Andal dengan tajuk "*My Voice is My Invoice*". Poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut:
 - a. Kiat memilih narasumber
 - 1) Apabila pemandu siniar mewawancarai narasumber yang tidak memberi banyak nilai pada kehidupan pendengar, maka pemandu siniar akan menjadi tuan rumah siniar yang tidak berhasil.
 - 2) Memang sulit untuk mendapatkan tamu yang menarik pada umumnya, tetapi jika pemandu siniar mewawancarai orang-orang biasa yang hanya bekerja keras setiap hari, maka akan kesulitan untuk membuat pendengar terlibat.
 - b. Penelitian latar belakang narasumber
 - 1) Pemandu siniar harus melakukan penelitian tentang narasumber sehingga dapat memaparkannya kepada audiens serta mengetahui cukup banyak tentang narasumber dalam wawancara.
 - 2) Pemandu siniar harus menggali kepribadian narasumber, di antaranya dengan membaca artikelnya, menjelajahi profil media sosialnya, mempelajari pernyataannya, serta mencari pendapat orang mengenai narasumber yang bersangkutan.
 - 3) Pemandu siniar juga harus mengetahui pencapaian besar yang pernah diraih narasumber seperti memenangkan penghargaan, menulis buku, atau berbicara di sebuah acara.
 - c. Kenali pekerjaan narasumber
Bagian dari meneliti narasumber berarti membuat pemandu siniar

terbiasa dengan pekerjaan narasumber tersebut, yang dapat diperoleh melalui unggahan *blog*, unggahan media sosial, karya seperti buku, video, atau mendengarkan siniar lain yang pernah dikunjungi.

d. Penjajakan narasumber

Wawancara siniar adalah untuk audiens. Penjajakan penting untuk menentukan apa yang diketahui narasumber yang menarik bagi pendengar. Tidak ada gunanya membahas hal-hal yang sudah diketahui maupun hal yang tidak dipedulikan audiens.

e. Persiapkan pertanyaan

1) Tidak perlu mempersiapkan setiap kata yang akan diucapkan tetapi penting untuk memiliki daftar pertanyaan inti yang ingin ditanyakan kepada narasumber.

2) Beberapa tips dalam mengembangkan pertanyaan berkualitas, yaitu menghindari mengajukan pertanyaan dasar, jangan mengajukan pertanyaan ya/tidak, jangan mengajukan pertanyaan yang mengarah, ajukan satu pertanyaan pada satu waktu, jangan merujuk ke daftar pertanyaan, fokus pada pertanyaan "bagaimana" dan "mengapa", serta mulai dari awal.

f. Kirim pertanyaan kepada narasumber sebelum wawancara

Kirimkan daftar pertanyaan ke narasumber setidaknya seminggu sebelum perekaman. Hal ini akan memberi narasumber waktu untuk mengatur respons dan membuat narasumber menjadi lebih nyaman.

g. Jelaskan kepada narasumber mengenai deskripsi program siniar yang diampu, yang antara lain memuat tentang format siniar, target audiens, alokasi waktu, hingga promosi. Informasi ini akan membantu narasumber untuk menyesuaikan jawaban dengan target audiens sekaligus membuat narasumber merasa nyaman selama percakapan karena tidak akan ada kejutan.

h. Perhatikan waktu

Satu episode siniar sebaiknya tidak lebih dari satu jam. Empat puluh lima menit adalah kerangka waktu yang baik, tetapi jangan takut untuk mengakhirinya pada 25-15 menit jika dirasa sudah cukup membahas topik tersebut.

- i. Konten siniar yang menarik adalah yang berada di level aman namun menjurus ke kontroversial.
2. **Sogi Indra Dhuaja** menyampaikan mengenai Dibalik Layar Pembuatan Siniar, dengan poin paparan sebagai berikut:
- a. Tidak ada rumus khusus untuk membuat sebuah siniar yang sukses.
 - b. Alasan orang mendengarkan siniar adalah untuk mendengarkan cerita, memperbaiki diri, dan persahabatan.
 - c. Siniar membutuhkan cerita yang bagus, berdampak, kepribadian yang hebat, serta produksi yang hebat.
 - d. Jika episode siniar cukup panjang dapat dipertimbangkan untuk memecah menjadi beberapa episode.
 - e. Jangan membahas terlalu banyak topik.
 - f. Perlu kontinuitas untuk membangkitkan kembali episode siniar yang terdahulu, seperti melalui *highlight* maupun unggahan sosial media. Ini akan memancing kembali datangnya penonton atau pendengar.
 - g. Perekaman siniar harus dikondisikan sebagai perekaman audio yang didokumentasikan, agar pendengar dapat memperoleh gambaran apa yang sedang terjadi di studio.
3. Dalam diskusi, sejumlah peserta menyampaikan pendapat dan mengajukan pertanyaan, sebagai berikut:
- a. **Ricky Yohannes**, perwakilan dari Biro KLI Kemenkeu, menyampaikan mengenai konsep mengisi ruang publik dengan perspektif jumlah yang dinilai oleh pimpinan instansi. Kehadiran figur di luar menteri sebagai narasumber siniar seperti eselon I diperlukan dengan *personal branding*. Terkait hal ini narasumber menyampaikan bahwa siniar harus berdampak. Narasumber juga menyampaikan bahwa figur yang diwawancara sangat penting dalam sebuah siniar.
 - b. **Benedicta Trixie**, anggota KDS, menanyakan:
 - 1) Bagaimana cara terbaik untuk *breaking the ice*?
 - 2) Bagaimana elaborasi waktu dari pertanyaan yang diajukan kepada narasumber dalam wawancara?

3) Bagaimana cara memotong yang sopan dari pernyataan narasumber?

Jawaban dari narasumber:

1) Pertanyaan dibuat sesimpel dan seringan mungkin.

2) Tim dapat saling membantu dengan memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Yang diingatkan tentang waktu bukan hanya pemandu siniar.

3) Sangat sulit dan tidak disarankan untuk memotong pernyataan narasumber. Jika terpaksa, dapat dilakukan dengan meneruskan kalimat yang menyatakan persetujuan atas pernyataan narasumber dilanjutkan dengan kalimat yang ingin disampaikan. Selain itu dapat dilakukan dengan mengerucutkan atau melandaikan pertanyaan.

c. **Deni Setiadhi**, Pranata Humas Ahli Muda Setkab, menanyakan tentang cara mengatur waktu dengan membagi *part* setiap episode siniar yang ideal. Narasumber menekankan agar memperhatikan data statistik unggahan. Pemecahan unggahan juga dapat disesuaikan dengan topik yang dibahas, misal, episode pertama terkait substansi dan kedua sisi humanis.

d. **Muhammad Raditya Aviantara**, anggota KDS, menanyakan mengenai cara membangun *theater of mind* dalam siniar. Narasumber menjelaskan bahwa kunci dari wawancara yang baik adalah menjadi pendengar yang baik. Narasumber juga menekankan bahwa siniar adalah tentang pendengar sehingga membangun *theater of mind* adalah keharusan.

e. **Asdep Humas dan Protokol Said Muhidin** menanyakan mengenai pembagian persentase sisi humanis dan substansi dalam siniar. Narasumber berpendapat bahwa bobot sisi humanis sebaiknya lebih besar dari sisi substansi karena lebih berpotensi menarik audiens.

4. Pada sesi Ronal Surapradja dan Sogi Indra Dhuaja juga dilakukan praktik perancangan pembuatan siniar. Pada bagian ini seluruh peserta diminta merancang sebuah episode siniar dilengkapi dengan tema, usulan narasumber utama dan pendamping, usulan judul, hingga strategi promosi.

III. SESI EVALUASI

Selain pemaparan dan diskusi, DKT juga dilengkapi dengan sesi evaluasi siniar sebagai sarana komunikasi publik, Podkabs, dan penyelenggaraan acara. Berikut rangkuman pernyataan dari narasumber dan sejumlah peserta DKT:

1. Peny Meliaty Hutabarat

- a. Saat ini momentum platform dan konten berbasis digital audio. Oleh karena itu, siniar harus dioptimalisasi untuk jadi salah satu saluran komunikasi publik.
- b. Sekarang lembaga pemerintah telah mulai makin menaruh perhatian kepada pentingnya kehadiran siniar sebagai salah satu saluran komunikasi publik.
- c. Podkabs adalah salah satu siniar yang sudah memulai dengan *branding* yang cukup baik. Podkabs sudah mencoba menghadirkan konten-konten yang relevan dan juga tapi juga tetap informatif dan edukatif.
- d. Harapannya semoga Podkabs bisa menjadi satu *benchmark* ataupun contoh yang baik bagi lembaga pemerintahan lainnya untuk mengoptimalkan siniar sebagai salah satu platform komunikasi publik
- e. DKT dengan tema optimalisasi siniar sebagai sarana komunikasi publik adalah salah satu *event* yang cukup menarik dengan momentum yang tepat. Diharapkan acara ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

2. Ronal Surapradja

- a. Siniar adalah salah satu jenis komunikasi dalam *new media* yang tidak bisa dilawan kehadirannya sehingga humas pemerintah harus *riding the waves*.
- b. Jika ada sebuah pesan yang ingin disampaikan, siniar adalah kanal yang potensial karena peminatnya semakin hari semakin banyak tinggal.
- c. Perlu kemasan yang menarik untuk didengar dan membuat orang ingin mendengar. Manfaat dan apa yang dirasakan pendengar adalah hal yang penting.

- d. Podkabs masih terkesan 'sangat pemerintah'. Perlu dipikirkan bagaimana agar dengan semua koridor yang harus dipatuhi Podkabs masih tetap menarik dan tidak terkesan kaku dan berat.
- e. Harapannya Podkabs tetap dapat memberikan informasi yang baik dengan cara yang lebih menyenangkan dan lebih bisa diterima semua kalangan.
- f. Podkabs sudah dijalur yang benar, di jalur yang 'sudah asik'. Namun perlu sedikit *improvement*, terutama dari sisi pemandu siniar, konsep, dan kemasan agar dapat menepis stigma kanal pemerintah yang kaku dan berat. Peningkatan ini diharapkan akan memicu ketertarikan berbagai kalangan, mulai dari pejabat hingga anak nongkrong.
- g. Senang dengan konsep DKT yang menggunakan bahasa Indonesia, bukan FGD.

3. Sogi Indra Dhuaja

- a. Potensi siniar untuk komunikasi publik sangat bagus karena saat ini dengan mobilitas masyarakat dengan *mobile devices audio podcast* bisa dinikmati kapan dan di mana saja. Jadi besar sekali kesempatan untuk berbagai macam informasi bisa sampai ke masyarakat melalui siniar.
- b. Podkabs yang diproduksi internal sangat luar biasa hasilnya, nilainya 9 bintang dari 10.
- c. Meskipun masih terdapat beberapa komponen yang harus *di-touch-up*, Podkabs sudah memberikan satu identitas tersendiri dengan konten yang luar biasa.
- d. Diharapkan Podkabs dapat hadir secara reguler dan menyajikan hal-hal yang belum diketahui atau terjangkau oleh masyarakat.

4. Kepala Biro Hukum dan Hubungan Kemasyarakatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Fatahillah

- a. Siniar adalah sarana komunikasi publik yang sangat strategis karena langsung menghadirkan narasumber yang memberikan informasi kepada masyarakat.

- b. Siniar sekarang sudah dalam formal audio visual sehingga orang dapat melihat mimik, gestur, dan lain-lain. Ini sangat strategis dalam komunikasi publik.
- c. Podkabs bagus dan *brand*-nya menarik yang harus digaungkan di tengah masyarakat.
- d. Podkabs masih muda dan masih berpotensi dikembangkan, misalnya dengan menghadirkan dua narasumber yaitu dari unsur pemerintah dan masyarakat sehingga informasinya menjadi lebih berimbang.
- e. Siniar yang disajikan dengan kemasan yang menarik dan bahasa yang ringan akan lebih mudah dimengerti. Namun tetap perlu kehati-hatian dalam menyampaikan informasi.
- f. Podkabs bisa menjadi jembatan dan jangkar komunikasi kebijakan di berbagai kementerian. Jika masing-masing kementerian memberikan komunikasi publik sesuai substansi dan perspektif masing-masing, Podkabs diharapkan dapat menjadi jembatan komunikasi terutama yang berpotensi menimbulkan polemik.
- g. DKT adalah kesempatan untuk belajar mengenai ilmu atau teori dan praktik siniar

5. **Heri Saktiyanto**, Tenaga Ahli Madya, Kedeputian IV, Kantor Staf Kepresidenan

- a. Siniar adalah sebuah revolusi pola komunikasi yang digalang oleh semua kalangan termasuk pemerintah. Pemerintah harus memanfaatkan dan 'menumpang' tren ini agar target-target komunikasi publik yang dilakukan pemerintah bisa tersampaikan ke masyarakat.
- b. Podkabs adalah sebuah langkah maju dan progresif agar narasi-narasi capaian kinerja pemerintah dapat disampaikan ke masyarakat yang lebih luas.
- c. Gaya bahasa yang santai diharapkan dapat lebih diterima oleh masyarakat luas.
- d. Podkabs memiliki lagu tema atau *jingle* yang bagus.
- e. Perlu perbaikan yang bersifat minor, seperti *bridging in* yang agak terlalu lama dan perbaikan grafis agar dapat dibaca.

- f. Berpendapat bahwa penjelasan tentang Podkabs tidak perlu diulang di setiap episode, cukup langsung ke narasumber dan bahasan yang ingin dicapai.
- g. Memperoleh banyak pelajaran dari DKT.

6. **Ricky Yohannes**, perwakilan dari Biro KLI Kemenkeu

- a. Apresiasi penyelenggaraan DKT yang menghadirkan narasumber yang sangat mumpuni dan memberikan pencerahan kepada seluruh humas pemerintah untuk dapat menginformasikan kebijakan pemerintah melalui siniar.
- b. Berharap humas pemerintah dapat menggunakan atau mengaktivasi siniar di instansi masing-masing untuk dapat lebih menyuarakan informasi teknis dan kebijakan mengenai kementerian ataupun untuk unit-unit eselon satu di bawahnya.
- c. Apresiasi atas keberadaan Podkabs yang memiliki konten bagus, humanis, dan informatif dengan *reach out*-nya yang juga sangat bagus.
- d. Berharap dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan Setkab dan juga kementerian/lembaga lainnya untuk bisa lebih mengembangkan dan menggaungkan siniar sebagai sarana untuk menginformasikan berbagai kebijakan pemerintah secara santai, humanis, namun tepat sasaran dan mengedukasi masyarakat.
- e. Siniar sangat berpotensi untuk komunikasi publik karena terdapat sejumlah khalayak yang lebih senang mendengar daripada melihat. Selain itu audio adalah salah satu instrumen yang sangat melekat di otak ataupun di ingatan.

7. **Akhmad Firmannamal**, perwakilan dari Kementerian Sekretariat Negara

- a. Potensi siniar sangat bagus untuk diaplikasikan dalam media kehumasan pemerintah karena memang berdasarkan hasil survei dan data terbaru perkembangan untuk media yang bersifat audio diproyeksikan akan tumbuh pesat.
- b. Berharap kehumasan pemerintah dapat beradaptasi dengan perkembangan dunia digital untuk mengoptimalkan komunikasi publik.

- c. Apresiasi terhadap Podkabs yang semua episodanya sudah sesuai dengan kebutuhan atau yang diinginkan oleh publik yaitu mencari informasi, tidak hanya yang bisa didapatkan di tempat lain tapi juga informasi atau sisi lain seorang menteri. Misalnya, kisah sukses menteri yang dapat menjadi pelajaran atau inspirasi bagi para audiens.
- d. DKT sangat bagus sehingga insan humas dapat belajar tidak hanya dari *textbook* tetapi juga dari praktisi. Kehadiran akademisi juga memberikan informasi yang berimbang.
- e. Podkabs tidak hanya menghadirkan menteri tetapi juga narasumber lain seperti Presiden, Wakil Presiden, bahkan sosok-sosok yang berada di lingkungan Istana Kepresidenan yang bisa menginspirasi masyarakat.

IV. PENUTUP

1. Kegiatan DKT terselenggara dengan baik dan lancar dengan hasil yang sesuai harapan.
2. Para peserta dapat memperoleh ilmu dan keterampilan serta pengalaman yang diperlukan dan bermanfaat untuk optimalisasi sinier dalam komunikasi publik pemerintah tidak hanya dari narasumber tetapi juga dari hasil diskusi dengan seluruh peserta.
3. Secara khusus, melalui DKT ini diperoleh sejumlah masukan baik dari narasumber maupun dari peserta terhadap episode Podkabs yang sudah ditayangkan yang sangat bermanfaat untuk penyempurnaan dan pengembangan Podkabs ke depannya.
4. DKT juga memberikan manfaat bagi pelaku kehumasan dari kementerian yang diundang untuk hadir, yang terlihat menunjukkan antusiasme mereka saat berdiskusi.
5. Sebagai bentuk apresiasi kepada narasumber dan peserta yang terlibat aktif dalam diskusi, Asdep Humas dan Protokol memberikan plakat bagi para narasumber dan suvenir baik penanya terbaik.
6. DKT didokumentasikan dalam bentuk foto dan rekaman video.
7. Hasil kegiatan DKT ini akan ditindaklanjuti dengan menyampaikan rekomendasi kepada para pemangku kepentingan terutama pimpinan di lingkungan Sekretariat Kabinet guna peningkatan pengelolaan komunikasi publik pemerintah yang efektif serta kepercayaan publik kepada pemerintah melalui optimalisasi pemanfaatan Podkabs.

3. Foto-foto Kegiatan.







4. Daftar Hadir.

No.	Nama	Jabatan	3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
1	Ronal Surapradja (Ronal Sunandar)	Pemandu siniar, pengajar, presenter, penyiar radio, aktor, dan pemilik studio produksi rekaman			
2	Sogi Indra Dhuaja	Komisaris Podkesmas Asia Network, penyiar radio, aktor, dan presenter			
3	Peny Meliaty Hutabarat, S.Sos., M.S.M.	Dosen Penyiaran Multimedia UI, pakar komunikasi publik			

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELEPON	EMAIL	Tanda Tangan		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
1	Sjahriati R	DICK-1	Setkab	0816318896				
2	Rusri	DKK 1	Setkab					
3	Akhamad Firdaus	HUMAS SETNEG	SETNEG	081319008100				
4	Novia Budhi A	Inspektorat	Setkab					
5	Eva A. Turnip	Inspektorat	Setkab					
6	Tini Handayani	Setpras	Setpras	081319005105				
7	Yuyu Mulyani	Askep Master	Setkab	091296321060				
8	Dwi Suryo Kusuma Dewa	Prakom	KemenPUPR	085691068914				
9	A.M. Heri Saktiyanto	TA Madya	KSP	08118110270				
10	Heru Priyambono	Askep DICK-2	Setkab	08131044624				

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELEPON	EMAIL	Tanda Tangan		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
11	Widiana R	Inspektorat	Setkab	081215749512				
12	Sento PS	PTT	SETKAB	08589968495				
13	Soemando	Ofis	Setkab	0822758551				
14	Nur Adhani	Ksb	ATR/BPN	08129667246				
15	Suci Adia A.	PPNPN	ATR/BPN	081074151019				
16	Andi Tanni Sessu	Pengelola Naskah	Setkab	0811798117				
17	Tessat	Prabum Madya	Kemwres	08196685744				
18	Alvira Devani	Praktisi Humas	Kemenlu	08111109051				
19	Fatahi Ihs	KPPPA/ROHH	Kempppa	08151353463				
20	Murdiansyah R	Pronata Humas	KemenPPPA	0811886133				
21	Ricky Y	keb. Hubkem	Kemenkeu	08151705100				

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
Kedeputian Bidang Dukungan Kerja Kabinet								
1	Dr. Thanon Aria Dewangga, S.IP., M.Si.	Deputi Bidang Dukungan Kerja Kabinet	Sekretariat Kabinet					
2	Said Muhidin, S.H., M.H.	Asisten Deputi Bidang Hubungan Masyarakat dan Protokol	Sekretariat Kabinet					
3	Mita Apriyanti, S.Sos., M.Si.	Pranata Humas Ahli Madya	Sekretariat Kabinet					
4	Syahron Teridel, S.Sos., M.Si.	Pranata Humas Ahli Madya	Sekretariat Kabinet					
5	Sherin Novira Dewi Afianty, S.IP., M. A.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet					
6	Shally Lydia Nainggolan, S.Si., M.SPR.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet					
7	Munamad Abdulh Abdullah, S.H.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet					
8	Jeanne Anggun Yanibella Butar Butar, S.I.Kom.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet					

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
9	Kurniawati, S.Kom., M.I.S.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet					
10	Deni Setiadhi, S.Kom.	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretariat Kabinet	085702452022	deni.setiadhi@gmail.com			
11	Risdina Baetuloehman, S.Sos.	Kepala Subbidang Pelaksanaan Acara	Sekretariat Kabinet					
12	Heni Hendrawati, S.Sos.	Kepala Subbidang Penghubung	Sekretariat Kabinet	08133060431				
13	Mayrizky Ramadhani, S.I.Kom.	Analisis Humas	Sekretariat Kabinet	0821 2266 9227	mayrizky.ramadhani@gmail.com			
14	Dinda Ayu Kusumaningrum, S.I.Kom.	Jurnalis	Sekretariat Kabinet	081381213251	dinchayak06@gmail.com			
15	Rahmat Hidayat, A.Md.	Penata Liputan	Sekretariat Kabinet					
16	Rara Firlina, S.Sos.	Analisis Humas	Sekretariat Kabinet	087736787812	Firlina.rara@gmail.com			
17	Dindha Cahyoening Moerthi, S.I.kom.	Analisis Berita	Sekretariat Kabinet	0858 886770	moerthi.dindha@gmail.com			
18	Rizki Sepasthika Fatmaprila, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat Kabinet	081391687642	fatmaprila@gmail.com			
19	Hernila Dyah Kusumastuti, S.I.Kom	Analisis Berita	Sekretariat Kabinet	087729533731	kusumastuti@gmail.com			

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
20	Annisa Ika Tiwi, S.I.P.	Analisis Humas	Sekretariat Kabinet	085697541254				
21	Ibrahim, S.Kom.	Analisis Data dan Informasi	Sekretariat Kabinet					
22	Tri Wahyuni Novianti, S.E.	Kepala Bidang Perekaman	Sekretariat Kabinet					
23	Fransisca Alyanti, S.Sos., M.Si.	Kepala Subbidang Penyiapan Bahan Persidangan Bidang Perekonomian, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan	Sekretariat Kabinet					
24	Tri Astuti Puspita Rini, S.Sos., M.P.P.M.	Kepala Subbidang Program dan Anggaran	Sekretariat Kabinet					
25	Anis Sawayaningsih, S.H.	Pengelola Persidangan	Sekretariat Kabinet					
26	Ipda Ari Cahyadi	Petugas Protokol	Sekretariat Kabinet					
27	Ipda M. Sabar Iman, S.H.	Petugas Protokol	Sekretariat Kabinet					
28	Nurlita Wahyuningtyas, S.STP.	Petugas Protokol	Sekretariat Kabinet					
29	Bripka Adam Wiguna, S.H.	Petugas Protokol	Sekretariat Kabinet					
30	Fahru Nur Syahid	Petugas Protokol	Sekretariat Kabinet					

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
31	Agung Prasetya	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet					
32	Melyadi Amir	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet					
33	Abdurrahman Fauzi	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet					
34	Fitri Damayanti	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet	08768846532	fitri.damayanti-1992@gmail.com			
35	Teguh Iqbal Alam	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet	081222079453	ivoteguh1ca@gmail.com			
36	Jihan Widowati	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet	08118404652	jihanwidowati2@gmail.com			
Kedepuitan Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan								
37	Novilia Mayasari, S.IP., M.A.	Kepala Bidang Hubungan Regional	Sekretariat Kabinet	0817181871	nmayalia@gmail.com			
38	Aprilia Dwi Ariyanti, S.H.	Kepala Subbidang Otonomi Daerah	Sekretariat Kabinet	08119340411	aprilia.dwi@setkab.go.id			
39	Benedicta Trixie Ariestianti, S.IP.	Kepala Subbidang Pengembangan dan Promosi Hak Asasi Manusia	Sekretariat Kabinet	081218529600	bontrixiarika@gmail.com			
40	Farid Budi Prabowo, S.IP., M.NSP.	Kepala Subbidang Keamanan	Sekretariat Kabinet	081299680259	faridprabowo@gmail.com			

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
Kedepuitan Bidang Kemaritiman dan Investasi								
41	Wina Aprilita, S.Kom., M.A	Kepala Subbidang Perubahan Iklim dan Pelestarian Lingkungan Hidup	Sekretariat Kabinet	081389784113	wina.aprilita@gmail.com			
42	Difa Giovanni Anggasta Sari, S.E.	Kepala Subbidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Sekretariat Kabinet	087085255226	difagiovanni@gmail.com			
43	Ahmad Wildan Masyhari, S.H.	Analisis Hukum	Sekretariat Kabinet	085719112221	wildanmasyhari@gmail.com			
Kedepuitan Bidang Perekonomian								
44	Defta Adiprima, S.E.	Analisis Perekonomian	Sekretariat Kabinet	085156254131	defta.adiprima@gmail.com			
45	Allinka Ilmarani, S.A.	Analisis Perekonomian	Sekretariat Kabinet	082244795305	allinkailmarani@gmail.com			
46	Niamu Robby Fie Dhuha, S.E.I.	Analisis Perekonomian	Sekretariat Kabinet	085710236732	niamu.dhuha@gmail.com			
47	Muhammad Raditya Aviantara, S.E.	Analisis Perekonomian	Sekretariat Kabinet					

NO	NAMA	JABATAN	INSTANSI	NOMOR TELP	EMAIL	TANDA TANGAN		
						3 Agustus 2022	4 Agustus 2022	5 Agustus 2022
Kedepuitan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan								
48	Dewa Ayu Sekar Saraswati, S.H.	Analisis Hukum	Sekretariat Kabinet	087889452077				
49	Oktaviana Sinaga, S.Pd.	Analisis Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Kabinet	083878529230	oktaviansinaga@gmail.com			
50	Novia Ayu Rinaldy, S.H.	Analisis Hukum	Sekretariat Kabinet	089613099931	noviaayurinaldy@gmail.com			
Kedepuitan Bidang Administrasi								
51	Hendri Daud, Ak., M.Si., C.A., CCSA.	Pjt. Inspektur Inspektorat	Sekretariat Kabinet	0818723466	hendri.daud@sektel.go.id			
52	Fahmi Yudoro, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Muda	Sekretariat Kabinet	08151337563	fahmi.yudoro@sektel.go.id			
53	Euis Damayanti, S.I.A	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	Sekretariat Kabinet	08568841988				
54	Riki Rubianto	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet	08213026277	rubianto06@gmail.com			
55	Enceng Darsa	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet					
56	Muhammad Rizky Firgianto	Pegawai Tidak Tetap	Sekretariat Kabinet	085017364704	figirgianto@gmail.com			

5. Tim Kerja Forum Konsultasi Publik.

Penasihat	: Dr. Thanon Aria Dewangga, S.I.P., M.Si.
Penanggung Jawab	: Said Muhidin, S.H., M.H.
Ketua	: Syahrion Teridel, S.Sos., M.Si.
Wakil Ketua	: Kurniawati, S.Kom., M.I.S.
1. Bidang Administrasi dan Keuangan	
Koordinator	: Deni Setiadhi, S.Kom.
Anggota	: Annisa Ika Tiwi, S.I.P. : Jihan Widowati
2. Bidang Acara	
Koordinator	: Sherin Novira Dewi Afianty, S.IP., M. A.
Anggota	: Mayrizky Ramadhani, S.I.Kom. : Rara Firlina, S.Sos. : Ibrahim, S.Kom.
3. Bidang Publikasi	
Koordinator	: Jeanne Anggun Yanibella Butar Butar, S.I.Kom.
Anggota	: Dindha Cahyoening Moerthi, S.Ikom. : Rizki Sepasthika Fatmaprila, S.Kom. : Hernila Dyah Kusumastuti, S.I.Kom
4. Bidang Sekretariat dan Akomodasi	
Koordinator	: Heni Hendrawati, S.Sos.
Anggota	: Dinda Ayu Kusumaningrum, S.I.Kom. : Fitri Damayanti
5. Bidang Transportasi & Perlengkapan	
Koordinator	: Muhamad Abduh Abdullah, S.H.
Anggota	: Rahmat Hidayat, A.Md. : Teguh Iqbal Alam : Riki Rubianto
6. Bidang Dokumentasi & Pertemuan Daring	
Koordinator	: Shally Lydia Nainggolan, S.Si., M.SPR.
Anggota	: Agung Prasetya : Abdurrahman Fauzi : Melyadi Amir
7. Bidang Protokol	
Koordinator	: Bhouwedha Putra Saktiadi, S.IP., M.M
Anggota	: Haris Satya Putra, S.E. : Risdina Baetulrohman, S.Sos.